



RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2019

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DINAS SOSIAL

Jl. Raya Dringu No. 13 ☎ (0335) 421431

Fax. (0335) 421431

Email: dinsos.probolinggokota@gmail.com

K O T A P R O B O L I N G G O




KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat Nya kepada kita sekalian sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Probolinggo dapat terselesaikan dengan baik. Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Probolinggo Tahun 2019 merupakan tahun kelima pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2018 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Probolinggo, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Sosial Kota Probolinggo dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Probolinggo, Mei 2018
KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PROBOLINGGO

M. M. M. M. M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630811 198701 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU	6
BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD.....	14
3.1. Visi dan Misi.....	14
3.2. Tujuan dan Sasaran	15
3.3. Indikator Kinerja Utama	16
3.4. Strategi dan Kebijakan	18
BAB IV PENUTUP	30

BAB I | **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Probolinggo Tahun 2019 adalah sebuah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Probolinggo yang berpedoman pada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2015-2019.

Rencana Kerja ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2019 secara berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Kerja ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan strategis serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan selama Tahun 2019. Rencana Kerja ini merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dalam pelaksanaannya menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Probolinggo yang disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) amatlah penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun karena didalamnya menurut rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RKPD SKPD Tahun 2014 dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan tetap memperhatikan upaya pemecahan masalah secara faktual utamanya yang berkembang di masyarakat serta dengan mengupayakan, mengakomodir dan memperhatikan hasil Musrenbang Kota Probolinggo Tahun 2018.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, berakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009 Probolinggo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Visi dan Misi Kota Probolinggo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Probolinggo Tahun 2006-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Probolinggo;
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo;
14. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Probolinggo;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Sosial Kota Probolinggo Tahun 2019 adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah khususnya di Kota Probolinggo.

Sedangkan Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Sosial Kota Probolinggo Tahun 2019 adalah sebagai :

- Acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan Prioritas dan plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018 ;
- Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja sekaligus sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Sosial Kota Probolinggo;
- Memfasilitasi berbagai potensi sumber daya masyarakat/swasta/instansi non pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Probolinggo Tahun 2019 disusun dengan tata urutan penulisan sebagai berikut :

- BAB I** **PENDAHULUAN**, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
- BAB II** **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**
berisi tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Probolinggo Tahun 2018
- BAB III** **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**
Dalam bab ini juga diuraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Probolinggo Tahun 2019.
- BAB IV** **PENUTUP** yang berisi kaidah Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Probolinggo Tahun 2019.



BAB II | **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017**

Pada Dinas Sosial Kota Probolinggo terdapat 9 (sembilan) program dan 64 (Enam Puluh Empat) Kegiatan yang menjadi urusan wajib Dinas Sosial Kota Probolinggo dalam mewujudkan Visi dinas yaitu ***“Terwujudnya Kehidupan Sosial Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing”***.

2.1 Evaluasi Hasil Rencana Kerja Tahun 2017

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2017 pada Dinas Sosial Kota Probolinggo adalah sebagaimana tersebut dan terinci dalam tabel dibawah ini.:

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Probolinggo Tahun 2019
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017
DINAS SOSIAL KOTA PROBOLINGGO
Per 31 Desember 2017



No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Kinerja Hasil/Keluaran			Realisasi	
			Uraian	Satuan	Target	Anggaran	Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp 1.283.419.000	Prosentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran			Rp 1.208.788.704	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 126.000.000	Jumlah Pembayaran Listrik dan Air yang sudah terselesaikan	Bulan	12	Rp 106.988.882	12 bulan
2	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rp 581.910.000	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang telah terlaksana	Bulan	12	Rp 565.581.844	12 bulan
3	Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Rp 575.509.000	Jumlah Kegiatan yang telah terlaksana	Bulan	12	Rp 536.217.978	12 bulan
B	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Rp 1.292.095.000	Presentase Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur			Rp 1.250.997.289	
1	Pembangunan Gedung Kantor	Rp 230.000.000	Jumlah pembangunan gedung kantor yang sudah terselesaikan	Gedung	2	Rp 228.951.000	2 Gedung
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 340.000.000	Jumlah Kendaraan Operasional yang sudah dibeli	Kendaraan	8	Rp 327.333.000	8 Kendaraan
3	Pengadaan Mebeleur	Rp 96.000.000	Jumlah Mebeleur yang sudah dibeli	Unit	61	Rp 95.040.000	61 Unit



4	Pengadaan Alat Kantor, Alat RumahTangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi	Rp 278.000.000	Jumlah Alat kantor/Alat Rumah Tangga/Alat studio dan Alat Komunikasi yang sudah dibeli	Unit	42	Rp 261.649.489	42 Unit
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp 180.095.000	Jumlah pemeliharaan geduung kantor yang sudah terlaksana	Bulan	12	Rp 179.428.000	12 Bulan
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Rp 29.000.000	Jumlah Pemeliharaan Mobil jabatan yang sudah terlaksana	Bulan	12	Rp 28.315.000	12 Bulan
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 66.000.000	Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan yang sudah terlaksana	Bulan	12	Rp 59.885.800	12 Bulan
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat RumahTangga, Alat StudiodanAlat Komunikasi	Rp 65.000.000	Jumlah Pemeliharaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan alat Komunikasi yang sudah terlaksana	Bulan	12	Rp 62.395.000	12 Bulan
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Penjagaan, Gerbang dan Pagar, Pavingisasi dll)	Rp 8.000.000	Jumlah Taman yang dipelihara	Taman	1	Rp 8.000.000	1 taman
C	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Rp 126.037.150	Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur			Rp 123.724.000	
1	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI, Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, Pakaian Olah Raga dll	Rp 28.000.000	Jumlah Pegawai yang menerima Pakaian Dinas	Buah	105	Rp 27.895.000	105 Buah
2	Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	Rp 1.500.000	Jumlah Peringatan/Hari Besar yang diikuti Pegawai	Kegiatan	1	Rp 1.315.000	1 Kegiatan



3	Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari Jadi Kota Probolinggo	Rp 30.000.000	Jumlah Peringatan/Hari Besar yang diikuti Pegawai	Kegiatan	1	Rp 29.414.000	1 Kegiatan
4	Pembinaan Kepegawaian	Rp 66.537.150	Jumlah Pegawai Dinas yang mendapat Pembinaan/Sosialisasi	Kegiatan	1	Rp 65.100.000	1 Kegiatan
D	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Rp 391.440.000	Presentase peningkatan kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD			Rp 378.160.500	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 5.000.000	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Kegiatan	1	Rp 4.998.000	1 Kegiatan
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Rp 6.000.000	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Kegiatan	4	Rp 5.988.000	4 Kegiatan
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 3.000.000	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Kegiatan	1	Rp 2.920.000	1 Kegiatan
4	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD	Rp 10.000.000	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun	Kegiatan	2	Rp 9.998.000	2 Kegiatan
5	Penyusunan Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Perencanaan Lainnya	Rp 3.500.000	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun	Dokumen	5	Rp 3.483.000	5 Dokumen
6	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Rp 5.900.000	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun	Kegiatan	1	Rp 5.884.000	1 Kegiatan
7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp 50.000.000	Jumlah warga penerima bantuan yang di monev	Kegiatan	1	Rp 49.480.000	1 Kegiatan
8	Fasilitasi Hasil Pembinaan Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Rp 60.000.000	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	Kegiatan	10	Rp 58.887.500	10 Kegiatan



9	Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan (PMKS dan PBI)	Rp 248.040.000	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	Kegiatan	2	Rp 236.522.000	2 Kegiatan
E	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Rp 1.342.217.500	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima bantuan Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			Rp 1.055.179.415	
1	Pelayanan dan Rehabilitasi Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat (BWBLP)	Rp 40.000.000	Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat (BWBLP) yang mendapatkan Bantuan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Orang	30	Rp 12.209.000	14 Orang
2	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban HIV AIDS (ODHA)	Rp 15.000.000	Jumlah Korban HIV AIDS (ODHA) yang mendapatkan Bantuan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.	Orang	15	Rp 7.635.500	12 Orang
3	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (Gepeng, EksPsikotik, Narapidana, NAPZA dan Tuna Susila)	Rp 170.000.000	Jumlah Tuna Sosial (Gepeng, Eks Psikotik, Narapidana, NAPZA dan Tuna Susila) yang mendapatkan Bantuan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Orang	164	Rp 72.957.240	76 orang
4	Penunjang Operasional Shelter	Rp 75.000.000	Jumlah Gedung shelter yang terpelihara sebagai sarana operasional	Bulan	12	Rp 61.450.000	12 bulan
5	Rehabilitasi dan Penyantunan	Rp 22.032.500	Jumlah Lanjut Usia yang	Kegiatan	1	Rp 15.567.500	1 Kegiatan



	Sosial Bagi Lanjut Usia		mendapatkan Bantuan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.				
6	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Rp 374.140.000	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Bantuan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Orang	213	Rp 302.741.300	191 Orang
7	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berkebutuhan Khusus	Rp 55.380.000	Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus yang mendapatkan Bantuan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.	Orang	60	Rp 50.931.300	60 orang
8	Deteksi Dini Penyandang Disabilitas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM)	Rp 10.555.000	Jumlah Penyandang Disabilitas yang terdeteksi dan terdata	Kegiatan	1	Rp 6.275.000	1 Kegiatan
9	Optimalisasi Penanganan PMKS Oleh Komite PMKS	Rp 50.000.000	Jumlah anggota Komite PMKS yang mengikuti penanganan PMKS	Kegiatan	4	Rp 47.812.500	4 Kegiatan
10	Bantuan Peralatan Usaha dan Alat Bantu Lanjut Usia	Rp 88.110.000	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan bantuan peralatan usaha dan alat bantu.	Orang	64	Rp 79.056.000	60 Orang
11	Fasilitasi Pembinaan Lingkungan Sosial	Rp 30.000.000	Jumlah PMKS yang mendapatkan Sosialisasi	Kegiatan	1	Rp 26.250.000	1 kegiatan
12	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pemulung	Rp 100.000.000	Jumlah Pemulung yang mendapat pembinaan dan pelatihan Keterampilan	Orang	20	Rp 81.903.500	20 Orang
13	Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Disabilitas	Rp 100.000.000	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bantuan berupa Pelatihan	Kegiatan	2	Rp 95.574.000	2 kegiatan



			Wirausaha				
14	Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Rp 212.000.000	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan berupa Pelatihan Wirausaha	Kegiatan	4	Rp 194.816.575	4 kegiatan
F	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Rp 255.467.500	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima bantuan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			Rp 217.752.500	
1	Pembinaan Organisasi Sosial (Karang Taruna, Karang Werda)	Rp 95.467.500	Jumlah Karang Taruna aktif yang mendapatkan bantuan stimulan dan pembinaan.	Kegiatan	5	Rp 73.951.500	5 Kegiatan
2	Peningkatan Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Rp 50.000.000	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) aktif yang mendapatkan bantuan stimulan dan pembinaan.	Kegiatan	2	Rp 47.012.500	2 Kegiatan
3	Pembinaan dan Sosialisasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Rp 110.000.000	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) aktif yang mendapatkan bantuan stimulan dan pembinaan.	lembaga	8	Rp 96.788.500	7 lembaga



G	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp 504.960.000	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima bantuan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat			Rp 356.314.791	
1	Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	Rp 100.000.000	Jumlah Veteran yang mendapat bantuan pemberdayaan sosial.	Orang	91	Rp 85.789.791	91 Orang
2	Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN)	Rp 30.000.000	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	Kegiatan	1	Rp 24.625.000	1 Kegiatan
3	Operasional dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Rp 75.000.000	Jumlah Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dipelihara	Bulan	12	Rp 72.935.000	12 Bulan
4	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Rp 250.460.000	Jumlah kegiatan yang terlaksana	Kegiatan	2	Rp 138.465.000	2 Kegiatan
5	Pemberdayaan Kepala Rumah Tangga Perempuan/Janda	Rp 49.500.000	Jumlah kegiatan yang terlaksana	Kegiatan	1	Rp 34.500.000	1 Kegiatan
H	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN	Rp 1.204.577.622	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima bantuan Pengembangan Kapasitas dalam rangka Pengentasan Kemiskinan			Rp 1.133.856.330	
1	Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Rp 50.000.000	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan pelatihan.	Orang	25	Rp 46.487.500	25 Orang
2	Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Rp 75.000.000	Jumlah kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang terlaksana	Kegiatan	1	Rp 73.237.500	1 Kegiatan



3	Kemandirian Usaha Bagi Fakir Miskin	Rp 55.000.000	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan sosialisasi/assesmen/pembinaan	Orang	23	Rp 45.437.500	23 Orang
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	Rp 100.000.000	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan stimulan/peralatan	Orang	54	Rp 92.229.160	54 orang
5	Bantuan Peralatan Bagi Fakir Miskin	Rp 300.000.000	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan stimulan/peralatan	Orang	172	Rp 279.911.500	172 orang
6	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri Bagi Masyarakat	Rp 233.170.000	Jumlah PMKS yang mendapat pelatihan ketrampilan	Kegiatan	3	Rp 216.275.850	3 Kegiatan/78 Orang
7	Bantuan Raskin	Rp 198.000.000	Jumlah Orang yang mendapatkan bantuan raskin	Orang	900	Rp 197.459.820	900 Orang
8	Operasional Penyaluran Raskin	Rp 193.407.622	Jumlah kegiatan yang telah terlaksana	Kegiatan	1	Rp 182.817.500	1 Kegiatan
I	PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAN JAMINAN SOSIAL	Rp 695.301.450	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima bantuan Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Jaminan Sosial			Rp 544.129.480	
1	Program Keluarga Harapan	Rp 92.320.000	Jumlah kegiatan penyaluran Program Keluarga Harapan yang terlaksana	Kegiatan	4	Rp 32.723.000	4 Kegiatan
2	Jaminan dan Perlindungan	Rp 90.000.000	Jumlah lanjut usia yang	Orang	119	Rp 60.663.780	119 orang



	Sosial Bagi Lanjut Usia		terpenuhi kebutuhan dasarnya				
3	Jaminan dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Terlantar dan Anak Yatim (Termasuk PKSA)	Rp 93.582.450	Jumlah Anak terlantar dan anak yatim yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Anak	235	Rp 93.582.450	235 Anak
4	Advokasi dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Bermasalah dengan Hukum	Rp 20.000.000	Jumlah anak Bermasalah dengan Hukum yang mendapat bantuan stimulan.	Kegiatan	1	Rp 16.269.000	1 Kegiatan
5	Peningkatan Kompetensi Bagi Pendamping PKH	Rp 45.000.000	Jumlah pendamping PKH yang mendapat pembinaan/bimbingan	Kegiatan	1	Rp 34.271.250	1 Kegiatan
6	Pemantapan Wawasan dan Keterampilan Bagi Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Rp 55.337.500	Jumlah Kegiatan pembinaan/bimbingan yang terlaksana	Kegiatan	2	Rp 51.561.000	2 kegiatan
7	Bimbingan Teknis Penanggulangan Bencana	Rp 48.861.500	Jumlah Kegiatan pembinaan/bimbingan yang terlaksana	Kegiatan	1	Rp 43.061.500	1 kegiatan
8	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Rp 136.975.000	Jumlah Kasus yang ditangani	Kegiatan	2	Rp 115.187.500	2 kegiatan
9	Isbat Nikah Massal	Rp 113.225.000	Jumlah Warga yang mendapatkan Surat Nikah Sah dari Negara	Orang	50	Rp 96.810.000	37 Orang



BAB III | **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN**

3.1 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Probolinggo

Sebagaimana diketahui bahwa Visi Kota Probolinggo yaitu “Kota Probolinggo Maju, Sejahtera dan Berkeadilan”, maka untuk mewujudkan cita-cita tersebut salah satunya diperlukan suasana yang kondusif dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berkeadilan sosial serta ditandai dengan adanya kesejahteraan sosial masyarakat yang semakin meningkat.

Berdasarkan hal tersebut, maka *Visi* Dinas Sosial Kota Probolinggo adalah
***“Terwujudnya Kehidupan Sosial Masyarakat Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing”***

Dimana makna Visi Dinas Sosial tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Masyarakat Sejahtera** : Masyarakat yang terpenuhi segala kebutuhannya secara lahir dan batin;
- Masyarakat Mandiri** : Masyarakat yang mampu menciptakan lapangan kerja melalui kegiatanberwirausaha;
- Masyarakat Berdaya Saing** : Masyarakat yang mampu bertahan dengan perubahan kondisi sosial dan dapat memenuhi segala kebutuhannya sendiri;

Berdasarkan Visi Dinas Sosial Kota Probolinggo tersebut di atas, maka Dinas Sosial Kota Probolinggo menjabarkannya ke dalam *Misi* sebagai berikut:

***“Meningkatkan kemandirian sosial masyarakat melalui upaya
pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)”***

Misi ini adalah menciptakan masyarakat Kota Probolinggo yang sejahtera, mandiri dan mampu berdaya saing dengan upaya pemberdayaan sosial melalui pelatihan kewirausahaan, pelatihan keterampilan bagi PMKS serta Pengembangan dan Pemberdayaan PSKS.



3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Probolinggo

1. Tujuan

Tujuan Dinas Sosial Kota Probolinggo merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Kota Probolinggo kelima yang mengandung makna :

- Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra.
- Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.
- Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan tersebut maka Dinas Sosial Kota Probolinggo dalam mewujudkan misi tersebut menetapkan **Tujuan** sebagai berikut :

“ Meningkatkan kemandirian dan perlindungan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ”

Setelah menetapkan Tujuan kemudian Dinas Sosial menentukan Indikator guna mengetahui sejauh mana keberhasilan SKPD dalam rangka mencapai keberhasilan Tujuan Dinas Sosial, adapun indikator tujuan Dinas Sosial Kota Probolinggo yaitu :

“ Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berhasil hidup Mandiri ”

2. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran Dinas Sosial yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya ke dalam strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat



digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2019, Dinas Sosial Kota Probolinggo menetapkan **sasaran** sebagai berikut :

***“Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) ”***

3.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:



INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KOTA PROBOLINGGO

1. Instansi : Dinas Sosial Kota Probolinggo
2. Visi : Terwujudnya Kehidupan Sosial Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing.
3. Misi : Meningkatkan Kemandirian Sosial Masyarakat Melalui Upaya Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
4. Tujuan : Meningkatkan kemandirian dan perlindungan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
5. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial.
6. Fungsi :
 - Perumusan kebijakan daerah di bidang Sosial;
 - Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Sosial;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Sosial;
 - Pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang Sosial;
 - Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	<p>Penjelasan : Jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya adalah Jumlah PMKS yang terbantu/ditangani masing – masing Bidang pada Tahun n. Jumlah PMKS yang seharusnya terpenuhi kebutuhan dasarnya adalah jumlah hasil pendataan PMKS yang ditangani masing – masing Bidang pada Tahun n.</p> <p>Formulasi Penghitungan : $\frac{\text{Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang seharusnya terpenuhi kebutuhan dasarnya}} \times 100\%$</p>	Laporan Hasil Kegiatan PMKS	- Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial



3.4 Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kota Probolinggo

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi yang dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi, maka Dinas Sosial Kota Probolinggo menetapkan strategi kebijakan sebagai berikut :

Untuk mewujudkan tujuan *“Meningkatkan kemandirian dan perlindungan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”* dengan sasaran *“Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”* ditetapkan **strategi:**

“ Meningkatkan Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ”

Kemudian menetapkan **Kebijakan :**

- Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
- Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
- Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat;
- Peningkatan Kualitas Pengembangan Kapasitas Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan;

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas dan juga berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka Dinas Sosial Kota Probolinggo menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
- Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan.



2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

- Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana;
- Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana.

3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;
- Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar dan hari Jadi Kota.

4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- Fasilitasi Hasil Pembinaan Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program, Keuangan dan Kegiatan.

5. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

- Penunjang Operasional Shelter;
- Rehabilitasi dan Penyantunan Sosial Bagi Lanjut Usia;
- Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- Optimalisasi Penanganan PMKS Oleh Komite PMKS;
- Fasilitasi Pembinaan Lingkungan Sosial;
- Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Disabilitas;
- Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (Gepeng, Eks Psikotik, Narapidana, BWBLP, NAPZA, ODHA, Pemulung dan Tuna Susila);
- Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.

6. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

- Pembinaan Organisasi Sosial;
- Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan;



- Fasilitasi / Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
7. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN
- Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
 - Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri Bagi Masyarakat;
 - Fasilitasi dan Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin;
 - Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan.
8. PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAN JAMINAN SOSIAL
- Program Keluarga Harapan;
 - Pemantapan Wawasan dan Keterampilan Bagi Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
 - Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
 - Isbath Nikah Massal;
 - Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
 - Jaminan dan Perlindungan Sosial bagi Anak Yatim dan Lanjut Usia;
 - Verifikasi dan Validasi data Kemiskinan (PMKS dan BDT)

Adapun program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Probolinggo, secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut :



**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
KOTA PROBOLINGGO**

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	RENJA 2018
1	2	3	4	5	6
110600.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran			Rp 984.182.575
110600.110601.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Listrik dan Air yang sudah terselesaikan	12 Bulan	Dinas Sosial Kota Probolinggo	Rp 122.400.000
110600.110601.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang telah terlaksana	12 Bulan	Dinas Sosial Kota Probolinggo	Rp 403.443.000
110600.110601.01.027	Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Presentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Dinas Sosial Kota Probolinggo	Rp 458.339.575
110600.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur			Rp 458.346.000
110600.110601.02.061	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah kegiatan verifikasi barang yang terlaksana	5 kegiatan	Dinas Sosial Kota Probolinggo	Rp 20.575.000
110600.110601.02.062	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Pengadaan yang terlaksana	4 Unit	Dinas Sosial Kota Probolinggo	Rp 249.500.000
110600.110601.02.063	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Pemeliharaan yang telah dilaksanakan	12 Bulan	Dinas Sosial Kota Probolinggo	Rp 188.271.000



110600.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur			Rp 148.450.000
110600.110601.03.018	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Presentase Kegiatan Bimtek yang sudah terlaksana	100%	Dinas Sosial Kota Probolinggo	Rp 62.035.000
110600.110601.03.020	Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar dan hari Jadi Kota	Presentase Kegiatan Peringatan/Upacara yang terlaksana	100%	Dinas Sosial Kota Probolinggo	Rp 86.415.000
110600.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase peningkatan kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD			Rp 108.636.000
110600.110601.06.030	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah warga penerima bantuan yang di monev	200 Orang	Dinas Sosial Kota Probolinggo	Rp 32.920.000
110600.110601.06.031	Fasilitasi Hasil Pembinaan Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Presentase Kegiatan Fasilitasi yang terlaksana	100%	Dinas Sosial Kota Probolinggo	Rp 45.265.000
110600.110601.06.033	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program, Keuangan dan Kegiatan	Persentase dokumen laporan yang tersusun	100%	Dinas Sosial Kota Probolinggo	Rp 30.451.000
110600.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan rehabilitasi Sosial			Rp 1.032.936.000
110600.110601.16.015	Penunjang Operasional Shelter	Jumlah Klien yang pernah direhabilitasi di Shelter	100 Orang	Dinas Sosial Kota Probolinggo	Rp 100.000.000
110600.110601.16.017	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Bantuan	139 Orang	Dinas Sosial Kota Probolinggo	Rp 206.702.000



110600.110601.16.020	Optimalisasi Penanganan PMKS Oleh Komite PMKS	Jumlah PMKS yang terjaring razia di Jalan	100 Orang	Dinas Sosial Kota Probolinggo	Rp	57.610.000
110600.110601.16.022	Fasilitasi Pembinaan Lingkungan Sosial	Jumlah peserta sosialisasi tentang Kota sehat dan Kota Layak Anak	100 Orang	Dinas Sosial Kota Probolinggo	Rp	21.861.000
110600.110601.16.029	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mengikuti Pelatihan Keterampilan Usaha	30 Orang	Dinas Sosial Kota Probolinggo	Rp	133.324.000
110600.110601.16.030	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah Anak Nakal/Terlantar/Putus sekolah yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan Usaha	20 Orang	Dinas Sosial Kota Probolinggo	Rp	150.670.000
110600.110601.16.031	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (Gepeng, Eks Psikotik, Narapidana, BWBLP, NAPZA, ODHA, Pemulung dan Tuna Susila)	Jumlah Tuna Sosial (Gepeng, Eks Psikotik, Narapidana, BWBLP, NAPZA, ODHA, Pemulung dan Tuna Susila) yang terbantu	67 Orang	Dinas Sosial Kota Probolinggo	Rp	175.189.000
110600.110601.16.032	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Jumlah Anak dan Lanjut Usia yang terbantu	140 Orang	Dinas Sosial Kota Probolinggo	Rp	187.580.000
110600.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terlaksana			Rp	429.206.000
110600.110601.21.009	Pembinaan Organisasi Sosial	Jumlah Peserta Orsos yang mendapatkan Pembinaan/Sosialisasi	58 Orang	Dinas Sosial Kota Probolinggo	Rp	112.180.000



110600.110601.21.012	Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	Prosentase Kegiatan Peringatan Upacara yang terlaksana	100%	Dinas Sosial Kota Probolinggo	Rp	117.026.000
110600.110601.21.013	Fasilitasi / Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Persentase kegiatan yang terlaksana	100%	Dinas Sosial Kota Probolinggo	Rp	200.000.000
110600.27	Program Pengembangan Kapasitas dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan	Persentase Fakir Miskin yang berhasil diberdayakan			Rp	686.698.000
110600.110601.27.005	Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan	700 Orang	Dinas Sosial Kota Probolinggo	Rp	97.668.000
110600.110601.27.013	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri Bagi Masyarakat	Jumlah PMKS yang mendapat pelatihan Keterampilan Usaha	30 Orang	Dinas Sosial Kota Probolinggo	Rp	116.480.000
110600.110601.27.014	Fasilitasi dan Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan stimulan/peralatan	143 Orang	Dinas Sosial Kota Probolinggo	Rp	372.550.000
110600.110601.27.015	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan	Jumlah Kepala Rumah Tangga/Janda yang mendapat pelatihan Keterampilan Usaha	60 Orang	Dinas Sosial Kota Probolinggo	Rp	100.000.000
110600.30	Program Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Jaminan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi Jaminan Sosialnya			Rp	806.479.000
110600.110601.30.016	Program Keluarga Harapan	Presentase Pelaksanaan Rapat Koordinasi antar Pendamping	100%	Dinas Sosial Kota Probolinggo	Rp	101.314.000



		PKH yang terlaksana				
110600.110601.30.036	Pemantapan Wawasan dan Ketrampilan Bagi Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Jumlah Peserta yang mendapatkan Sosialisasi/Pembinaan	200 Orang	Dinas Sosial Kota Probolinggo	Rp	85.000.000
110600.110601.30.038	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Peserta Dharma Wanita, PKK, Kasie Pemas, PSM dan masyarakat yang mengikuti Sosialisasi/Pembinaan	375 orang	Dinas Sosial Kota Probolinggo	Rp	50.000.000
110600.110601.30.044	Isbat Nikah Masal	Jumlah Masyarakat Miskin yang telah Memiliki Akta Nikah/disahkan oleh Negara	30 Orang	Dinas Sosial Kota Probolinggo	Rp	125.000.000
110600.110601.30.045	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Persentase kegiatan yang terlaksana	100%	Dinas Sosial Kota Probolinggo	Rp	164.600.000
110600.110601.30.046	Jaminan dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Yatim dan Lanjut Usia	Jumlah anak yatim dan Lansia yang mendapatkan bantuan	180 orang	Dinas Sosial Kota Probolinggo	Rp	117.565.000
110600.110601.30.047	Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan (PMKS dan BDT)	Presentase Kegiatan Verifikasi dan Validasi yang terlaksana	100%	Dinas Sosial Kota Probolinggo	Rp	163.000.000




BAB IV | PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Probolinggo Tahun 2019 ini disusun untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Sosial Kota Probolinggo.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Probolinggo Tahun 2019 merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi juga dimaksud sebagai media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Dinas Sosial Kota Probolinggo sehingga dapat diharapkan adanya umpan balik guna perbaikan kinerja di masa mendatang.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Probolinggo berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance dalam perspektif yang lebih luas maka Rencana Kerja (Renja) berfungsi sebagai pertanggung jawaban meningkatkan kualitas kinerja yang berkelanjutan sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Kota Probolinggo.

Probolinggo, Mei 2018
KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PROBOLINGGO

ABDULLAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630811 198701 1 002